

STRUKTURASI ORGANISASI MAHASISWA EKSTRA KAMPUS BERBASIS ISLAM DALAM MENDISKURSIKAN DERADIKALISASI PEMIKIRAN POLITIK DAN KEAGAMAAN

Ali Muhammad, Surwandono

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Ilmu Hubungan Internasional, Pasca Sarjana
Yogyakarta, Indonesia
Email: alim_ummy@yahoo.com

Abstrak-Tujuan artikel hendak menjelaskan tentang relevansi organisasi mahasiswa ekstra kampus dalam mendiskusikan deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan. Posisi mahasiswa sebagai pencerah peradaban memiliki peran penting dalam membuat peta pemikiran politik dan keagamaan yang tetap kritis, radikal namun tidak keluar dari nilai kemanusiaan. Untuk memperoleh obyektifikasi, penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif, untuk mengeksplorasi pengalaman yang berstruktur dari para aktivis organisasi ekstra kampus dalam mengelola diskursus pemikiran dan aksi politik-keagamaan. Populasi penelitian ini adalah pengurus organisasi kemahasiswaan yang bergabung dalam kelompok Cipayung maupun non Cipayung di propinsi daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengambil sampel penelitian melalui metode purposive random sampling. Dalam posisi situasi non krisis, organisasi ekstra kampus di Jogjakarta masih memimpin dibandingkan dengan pertumbuhan pemikiran organisasi radikal politik dan keagamaan di Kampus. Terdapat sejumlah problem strukturasi yang akut, yang dapat mengganggu peran alternative organisasi ekstra kampus dalam mendiskusikan deradikalisasi pemikiran radikal politik dan keagamaan.

Key Words: Deradikalisasi, Pemikiran Politik dan Keagamaan, Organisasi Ekstra Kampus, Strukturasi

I. PENDAHULUAN

A. Pengantar

Pertumbuhan pemikiran keagamaan dan politik yang berkarakter radikal berkembang dengan pesat di Indonesia dan telah menjadi ancaman yang serius. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya frekuensi kekerasan dan terror yang dilakukan oleh kelompok keagamaan dan politik yang berkarakter radikal terhadap kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat secara umum, seperti teror bom mobil, bom bunuh diri maupun bom buku maupun gejala “pencucian otak”. Dari serangkaian aktivitas terror tersebut, ada kecenderungan menempatkan anak muda sebagai target yang dipilih oleh kelompok radikal tersebut sebagai sarana untuk mengartikulasikan eksistensinya.

Dunia kampus yang dibangun dengan tradisi intelektualitas dan rasionalitas ternyata juga mampu

diinfiltirasi oleh kelompok radikal. Beberapa mahasiswa di kampus di Malang, Yogyakarta, Jakarta dan Bandung telah direkrut menjadi anggota dari jaringan kelompok radikal. Menurut Prof Sukemi, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Kementerian Pendidikan Nasional, maupun Johannes Frederik Warouw,

Sosiolog Universitas Indonesia menyatakan bahwa para agen pemikiran keagamaan dan politik radikal

memilih target mahasiswa yang cerdas dan memiliki idealisme tinggi untuk direkrut menjadi bagian dari kelompok radikal tersebut. Perkembangan kondisi ini memerlukan perhatian yang sangat serius dari kampus untuk melakukan serangkaian kebijakan dan program deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik di lingkungan kampus secara sistematis.

Organisasi ekstra kampus memiliki potensi luar biasa untuk ditempatkan sebagai agen deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik di tengah gagalnya berbagai program deradikalisasi dirilis oleh pemerintah. Dalam sejarah politik dan keagamaan di Indonesia, organisasi ekstra kampus memiliki kontribusi besar untuk menyelesaikan problem kebangsaan di tingkat kemahasiswaan melalui aktivitas intelektual yang intensif dan maupun di tingkat nasional melalui aktivitas intelektual dan politik yang cerdas. Program deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik dengan menggunakan organisasi ekstra kampus sebagai agen deradikalisasi diharapkan dapat menyelesaikan problem radikalisasi pemikiran keagamaan dan politik di tingkat kampus maupun di masyarakat.

Penelitian tentang pelebagaan diskursus deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik dengan menempatkan organisasi ekstra kampus sebagai agen deradikalisasi pemikiran keagamaan dan politik memiliki beberapa urgensi:

Pertama, meningkatnya budaya intoleransi di masyarakat yang ditandai meluasnya penyebaran pemikiran keagamaan dan politik yang berbasis radikal-kekerasan, baik di masyarakat maupun di dunia kampus. Semakin seringnya artikulasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok politik dan keagamaan telah

menyebabkan kegelisahan dan ketakutan di masyarakat untuk melakukan aktivitas politik, social, dan ekonomi.¹

Kedua, maraknya penyebaran pemikiran politik dan keagamaan yang berbasis radikal di kampus-kampus di Indonesia. Dalam konteks pemikiran ilmu social di dunia kampus, pilihan untuk mengembangkan cara berfikir secara radikal untuk memahami fenomena social sesungguhnya sebagai sebuah keniscayaan. Hal ini terkait dengan asumsi besar bahwa berfikir secara radikal akan memberikan kesempatan untuk berfikir secara komprehensif untuk menemukan sumber masalah secara lebih akurat dan menemukan solusinya dibandingkan dengan proses berfikir yang hanya bersifat artificial.

Paradigma kritis dalam ilmu social bahkan menganggap bahwa berfikir secara radikal adalah jawaban untuk memecahkan berbagai problem social yang selama ini tidak terselesaikan. Penyebaran pemikiran keagamaan dan politik yang berbasis radikal-kekerasan dikhawatirkan akan mengancam tradisi akademik berupa obyektivitas dan rasionalitas dalam memandang suatu persoalan dan diganti dengan tradisi absolutisme dan hegemonisme.²

Ketiga, belum efektifnya program deradikalisasi yang telah dirilis oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran pemikiran keagamaan dan politik yang berbasis radikal kekerasan di tengah masyarakat maupun di kampus-kampus. Ketidakberhasilan program deradikalisasi sedikit banyak ditentukan oleh pola, muatan, subyek dan obyek deradikalisasi yang cenderung tidak sistematis. Pola deradikalisasi yang lebih banyak mengedepankan logika doktriner hukum, konstitusi dan militer, muatan deradikalisasi yang cenderung tidak partisipatif (top down), bahkan terkadang difahami sebagai bagian dari pendangkalan keberagaman seseorang, subyek deradikalisasi yang dilakukan oleh petugas formal dengan jumlah yang sangat terbatas dan bukan dilakukan oleh orang-orang memiliki hubungan personal, yang kemudian menyebabkan derajat kelekatan menjadi sangat artificial, dan obyek deradikalisasi yang hanya terbatas, menyebabkan proses banyak kalangan yang sesungguhnya memiliki tradisi pemikiran radikal namun tidak berada dalam unit untuk dideradikalisasi menjadi tidak tersentuh.

B. Studi Pustaka

Radikal merupakan kata serapan dari bahasa Inggris "radical" yang artinya dasarnya adalah akar. Merujuk dari kamus Bahasa Indonesia, radikal didefinisikan sebagai kecenderungan pemikiran, sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu

secara mendasar. Sedangkan radikalisme merupakan tindakan yang menimbulkan sikap radikal di tengah masyarakat.³

Pemikiran radikal memiliki daya tarik yang luar biasa terhadap kelompok anak muda dan kelompok mahasiswa. Studi yang dilakukan oleh Surwandono dan Sidiq Ahmadi terhadap gejala tumbuhnya pemikiran radikal cukup menarik yakni aktivis organisasi ekstra kampus lebih tertarik untuk mendiskusikan kepada pemikiran politik dan keagamaan yang bersifat diametral, apakah kanan-politik (fasisme, totalitarianism), kanan-agama (fundamentalisme), kiri-politik (sosialisme, komunisme), kiri-agama (kiri Islam, teologi pembebasan), maupun liberal politik (liberalism), maupun liberal agama (liberalisasi)⁴ daripada pemikiran politik dan keagamaan yang bersifat moderat. Pemikiran politik dan keagamaan yang bersifat ekstrim difahami akan memberikan horizon berfikir yang luas sehingga akan ditemukan solusi-solusi atas persoalan social politik yang selama ini mengalami kebuntuan karena sempitnya horizon berfikir. Pemikiran politik dan keagamaan yang berbasis radikal juga dianggap sebagai narasi yang paling efektif untuk melakukan counter hegemoni terhadap dominannya pemikiran global yang berbasis liberalis-kapitalis.⁵

Dalam konteks politik di kampus, studi dari Surwandono dan Sidiq Ahmadi menunjukkan bahwa organisasi ekstra kampus dalam mendiskusikan pemikiran keagamaan dan politik cenderung memilih struktur pemikiran politik yang berbasis radikal kritis, yang terdiri dari;

Pertama, Pemikiran-pemikiran politik yang berbasis kiri, baik yang kiri radikal maupun kiri kritis,⁶ menjadi salah satu referensi utama dari hampir semua organisasi ekstra kampus. Pilihan untuk mengkonsumsi pemikiran yang berbasis kiri, dalam banyak kasus sebagai pilihan yang tak terhindarkan di tengah semakin derasnya pemikiran politik liberal yang diadopsi oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

³<http://sosbud.kompasiana.com/2010/12/10/urgensi-deradikalisasi-di-indonesia/> yang diunduh pada 12 April 2011 atau untuk kajian lebih dalam tentang radikalisme dalam Zada, K. (2003). *Islam radikal: Pergulatan ormas-ormas Islam garis keras di Indonesia* Jakarta: Teraju.

⁴ Lihat klasifikasi spectrum pemikiran politik dalam Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, Jakarta, Penerbit Radjawali, 2003

⁵ Surwandono, Sidiq Ahmadi, *Pelemagaan Fiqh Perbedaan Dalam Mendiskusikan Pemikiran Islam Berbasis Liberal dan Fundamental Pada Organisasi Ekstra Kampus Berbasis Islam di Yogyakarta*, Laporan Penelitian Hibah Bersaing (tidak diterbitkan), Yogyakarta, Fisipol UMY, 2010

⁶ Karl Mark, Frederich Engel sebagai basis normative pemikiran kiri kritis, yang kemudian muncul pemikiran kiri dari Hasan Hanafi, Moh Arkoun, ataupun pemikiran revolusioner seperti teologi pembebasan yang dibawa oleh Castro, maupun Che Guevara.

¹ Lihat ragam kekerasan pemikiran politik dan keagamaan dalam Endang Turmudi, dan Sihbudi, R. (2005). *Islam dan radikalisme di Indonesia*. Jakarta, LIPI Press).

² Lihat dalam Sri Yunanto, *Gerakan militan Islam: Di Indonesia dan di Asia Tenggara, [Islamic militant movement: in Indonesia and Southeast Asia]*. Jakarta: Ridep Institute, 2003

Kedua, pemikiran politik yang berbasis **kanan keagamaan**, baik yang bersifat moderat-adaptif dan radikal-revolusioner sedemikian rupa juga menjadi alternative sumber pemikiran. Pemikiran kanan revolusioner yang memandang sesuatu secara diskrit, difahami oleh beberapa aktivis organisasi ekstra kampus sebagai alternative eksplanasi realitas social yang yang rumit dan kompleks menjadi lebih sederhana.⁷

Ketiga, corak pemikiran radikal bebas, di mana kemudian menempatkan sesuatu *rule of law* sebagai sesuatu yang nisbi. Filsafat eksistensialisme yang menjadi rujukan semangat radikal dalam kebebasan ini menyebabkan segala tindakan agen dan struktur dalam masyarakat dikelola dengan hukum *permisivisme*. Filsafat eksistensialisme ini menjadi rujukan berfikir juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi organisasi ekstra kampus yang mulai sepi peminat. Mengembangkan pemikiran yang berwatakan radikal permisivisme difahami akan memberikan daya undang yang besar sehingga mahasiswa tertarik untuk bergabung dengan organisasi ekstra kampus.

Tumbuh dan berkembangnya pemikiran radikal di kampus, pada awalnya tidak menyebabkan persoalan yang serius. Berfikir radikal Yes, Bertindak Radikal No, demikian jargon yang sering diaktualkan oleh para aktivis organisasi ekstra kampus dalam melakukan diskursus pemikiran. Namun akhir-akhir ini, gejala radikalisasi pemikiran di kampus mengalami perubahan yang signifikan di mana terdapat sekelompok aliran politik dan keagamaan melakukan infiltrasi pemikiran radikal kepada para mahasiswa. Hasilnya cukup mengejutkan banyak kalangan, bahwa banyak mahasiswa menjadi korban dari indoktrinasi pemikiran dan aksi radikal dari kelompok politik dan agama tertentu. Bahkan para pelaku tindak kekerasan dan terror di Indonesia pada tahun 2010-2011 diperankan oleh para mahasiswa maupun sarjana yang baru lulus dari kampus.⁸

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mentransformasi kapasitas Organisasi Ekstra Kampus sebagai agen deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan di kampus-kampus di Yogyakarta. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat memberikan penjelasan yang akurat tentang posisi penyebaran pemikiran radikal di kalangan mahasiswa, derajat radikalisasi pemikiran dan proses untuk melakukan deradikalisasi;

⁷ Lihat pemikiran kanan keagamaan radikal dalam Azyumardi Azra, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Paramadina, 2003 ataupun dalam Muhammad Asfar (ed). *Islam lunak, Islam radikal: Pesantren, terorisme, dan bom Bali*, Surabaya: JP Press.

⁸ Dalam diskursus kekinian, kelompok politik keagamaan tersebut dihubungkan dengan kelompok NII. Lihat lebih jauh dinamika pemikiran radikal dalam ⁸ Shireen T Hunter, *Islamic Revivalism: Unity and Diversity*, Bloomington, 2003, Azyumardi Azra, *ibid*.

Data penelitian diperoleh melalui data primer dengan melakukan interview terstruktur kepada responden yakni aktivis organisasi ekstra kampus maupun kepada narasumber dan pakar. Focus group discussion dilakukan kepada pengurus Organisasi Ekstra Kampus, dan melakukan studi dokumen terhadap dokumen-dokumen, buku-buku, gambar-gambar yang terkait dengan issue radikalisme dan deradikalisasi..

Tehnis analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, analisa wacana secara simultan untuk digunakan menganalisis buku-buku, dokumen sejarah Organisasi Ekstra Kampus, dokumen pemaknaan terhadap kitab suci, dokumen-dokumen kebijakan counter terrorism, untuk kemudian bisa diambil makna terdalam dari pesan yang disampaikan.

Kedua, untuk mendapatkan analisis yang mendalam terhadap dari hasil wawancara dengan narasumber maupun responden dalam penelitian, maka akan dilakukan analisis fenomenologis, dan untuk menginterpretasi hasil dari pelaksanaan focus group discussion, maupun pelaksanaan expert meeting akan mengeksplorasi dengan menggunakan analisis simbolik.

Populasi penelitian adalah aktivis organisasi ekstra kampus berbasis keagamaan di Yogyakarta, seperti HMI MPO, HMI DIPO, IMM, PMII, KAMMI yang tergabung dalam kelompok Cipayung ataupun organisasi ekstra kampus berbasis keagamaan seperti kelompok Hizbut Tahrir, kelompok Jamaah Tabligh, kelompok Salafi, maupun beberapa variannya melalui stratified random sampling, untuk meningkatkan derajat representasi dari obyektivitas penelitian.

III. PEMBAHASAN

Meningkatnya aktivitas intoleransi, kekerasan dan terror di Indonesia mencerminkan bahwa banyaknya anggota masyarakat yang terpengaruh oleh logika berfikir dari kelompok radikal dan melakukan aktivitas intoleransi, kekerasan, terror atas nama kekuatan agama dan politik tertentu adalah sebagai sesuatu yang normal. Bahkan studi yang dilakukan oleh Petrus Golose, Ketua BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) menunjukkan bahwa para pelaku tindakan kekerasan dan terror tidak merasa takut atas ancaman hukuman jika melakukan perbuatan yang melanggar hukum.⁹

Lembaga Survei Indonesia (LSI), mengadakan riset nasional, untuk mengeksplorasi radikalisme pada tingkat muslim dewasa di Indonesia di tahun 2010.

Tabel I
Ragam Tindakan Yang Mengekspresikan Kecenderungan Radikal

No	Tindakan	Prosentase
I	Razia dan Sweeping tempat maksiat	2,6%

⁹ Lihat studi Petrus Golose, *Deradikalisasi terorisme : humanis, soul approach, dan menyentuh akar rumput*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2010

2	Bersedia Melakukan razia dan sweeping tempat maksiat	26,3%
3	Demonstrasi Terhadap Kelompok Lain	1%
4	Bersedia Melakukan Demonstrasi Terhadap Kelompok lain	26,9%
5	Menyumbang Materi Untuk Penegakan Syariat Islam	37,4%
6	Melakukan Penyerangan Rumah Ibadah	1,3%
7	Mengajak Orang lain agar mengikuiti pemikirannya	18,8%

Sumber: Lembaga Survei Indonesia, 2010.

Menurut Sri Yunanto program deradikalisasi mencakup berbagai komponen proses; deideologisasi reorientasi, motivasi, re-edukasi, resosialisasi serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain. Maka program deradikalisasi sebagai sebuah program pendidikan bisa mempunyai dimensi kognitif, dalam bentuk memasukkan faham yang tidak radikal untuk menghilangkan atau melepas pemikiran, sikap dan tindakan radikal dan kemudian menggantikannya dengan faham Islam yang toleran, compatible dengan kehidupan bangsa yang plural. Program deradikalisasi juga mempunyai dimensi afeksi, yaitu melakukan persuasi dengan melakukan berbagai kegiatan rehabilitasi agar mereka dengan sadar dan senang kembali kepada masyarakat, Islam dan motorik dalam bentuk menyinggalkan perilaku dan dukungan terhadap kekerasan.¹⁰

Studi yang dilakukan oleh Sri Yunanto terhadap program deradikalisasi pemerintah, justru menimbulkan persoalan serius, bahkan semakin memicu penyebaran pemikiran radikal. Selama ini program deradikalisasi dilakukan melalui beberapa pendekatan, seperti pendekatan keamanan, dan pendekatan penegakan hukum dan kurang menggunakan pendekatan melalui jalur budaya dan pendidikan relative belum banyak dieksplorasi. Pendekatan keamanan dan hukum cenderung mengedepankan unsur represif, sedangkan pendekatan budaya dan pendidikan mengedepankan unsure preventif dan humanis.

Ketua Majelis Ulama KH Makruf Amien yang mengatakan bahwa program deradikalisasi yang salah justru akan memicu radikalisme¹¹ Hal ini terkait dengan adanya pandangan bahwa program deradikalisasi merupakan sebuah program karet untuk memarginalkan peran politik masyarakat Islam, bahkan dikhawatirkan akan mengakibatkan pendangkalan akidah bagi kalangan umat Islam. Dalam pandangannya yang lebih penting bukan merubah pemikiran yang radikal melainkan membuat mereka mandiri secara

¹⁰ Lihat tulisan Sri Yunanto, . (ed). (2003). *Gerakan militan Islam: Di Indonesia dan di Asia Tenggara*, Jakarta: Ridip Institute. Atau dalam <http://idsps.org/headline-news/publikasi-idsps/tantangan-program-deradikalisasi-terorisme/>, yang diunduh pada 15 April 2011

¹¹ Republika, Senin 1 November 2010.

ekonomi dan menjauhkan diri dari kekerasan (disengagement from violence).¹²

Salah satu model deradikalisasi yang berhasil menurut Leo Suryadinata adalah program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Belanda dalam batas tertentu berkontribusi terhadap perkembangan radikalisme di Indonesia, di mana tokoh Sneevliet merupakan tokoh dari Belanda yang mengenalkan tradisi radikalisme di Indonesia. Pandangan Sneevliet kemudian mengubah struktur social dalam organisasi Sarekat islam yang didirikan oleh Hos Cokroaminoto menjadi terpecah dalam organisasi SI Putih di bawah kepemimpinan Agus Salim, dan SI Merah di bawah kepemimpinan Semaun.

Menurut Leo Suryadinata, program deradikalisasi yang didesain oleh pemerintah Belanda dengan melibatkan para pemikir dan perguruan tinggi guna menghadapi radikalisme agama. Froukje Demant merupakan peneliti radikalisme yang terkenal. Dia menyarankan agar pemerintah Belanda yang sekuler lebih terbuka untuk argumen-argumen religius dan kaum muslim moderat harus mengajak sesama muslim yang radikal masuk ke *mainstream* Islam yang damai. Pemberian ruang kepada fihak-fihak yang akan menjadi obyek radikalisasi untuk menyampaikan argumentasi dari keyakinan yang dipilihnya akan membuat arus keterbukaan komunikasi.¹³

Bagaimana mendesain program deradikalisasi yang efektif dan efisien?.Proses melakukan deradikalisasi dapat meminjam logika konstruktivisme yang dipergunakan oleh Antony Giddens untuk melacak relasi antara agen dan struktur. Pemikiran radikal dapat dianalogkan sebagai struktur, dan pelaku aktivitas kekerasan sebagai representasi agen. Struktur pemikiran radikal membentuk cara pandang dan perilaku agen dalam memaknai sesuatu. Struktur yang kuat dan berhirarkhi membuat agen tidak memiliki kesempatan untuk mengabaikan apa-apa yang menjadi harapan dan keinginan agen. Semakin terjadi ketimpangan kekuatan, otoritas, informasi antara struktur dan agen maka semakin posisi agen hanya menjadi sub ordinat dari kepentingan struktur.

Menurut Giddens, dalam konteks tertentu perilaku struktur dapat dipengaruhi oleh perilaku agen, atau dalam hal ini agen justru yang mengkonstruksi perilaku struktur. Agen yang memiliki kekuatan yang memadai, memungkinkan perilaku agen akan otonom, bahkan agen dapat mempengaruhi perubahan di dalam struktur sehingga perilaku agen kemudian berharmoni dengan perilaku struktur.¹⁴

¹²Republika, Rabu , 6 Oktober 2010

¹³ Lihat pandangan Leo Suryadinata dalam http://www.balipost.co.id/mediadeta_il.php?module=detailrubrik&kid=1&id=2490 yang diunduh pada 1 April 2011

¹⁴ Lihat Antony Giddens dalam Antony Giddens *Central Problems in Social Theory*, Berkeley: University of California Press, 1979 dan Anony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, Cambridge, U.K.: Polity Press, 1984. Atau

Lantas bagaimana kesiapan organisasi ekstra kampus, yang dalam sejarah organisasi kemahasiswaan Indonesia sebagai pilar penyangga peradaban? Studi yang dilakukan peneliti terhadap 5 organisasi ekstra kampus, yang selama ini dikenal dengan kelompok Cipayung, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam Diponegoro (HMI Dipo), dan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), maupun Komite Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menunjukkan beberapa hal.

Pertama, pemakaian kata dan aksi radikal bagi para aktivis organisasi ekstra kampus memiliki makna yang beragama, pada satu sisi radikal dimaknai sebagai secara positif terkait dengan tradisi berfikir fundamental, yang memungkinkan mahasiswa dapat menemukan pemikiran kritis yang solutif bagi masyarakat. Pemikiran radikal bagi mahasiswa adalah keniscayaan. Bagi aktivis PMII dan HMI MPO, pilihan aksi radikal seperti sejumlah aktivitas anarki, pemblokiran jalan, pembakaran ban, bagi mahasiswa adalah sebagai reaksi atas sejumlah kebutuhan komunikasi dalam mengartikulasikan kepentingan terhadap pihak terkait.¹⁵ Dan agak berbeda dengan pilihan aksi dari HMI Dipo, IMM, maupun KAMMI, di mana berfikir radikal tidak harus linier dengan tindakan anarki tatkala menghadapi kebuntuan komunikasi.

Pada sisi yang lain, sebagian besar aktivis Cipayung memaknai bahwa radikal bermakna negative, tatkala bermakna kepada pemikiran fundamental, kaku, mudah menyalahkan kelompok lain, tidak mengembangkan daya kritis, fanatic kepada kelompok, difahami sebagai sesuatu yang merusak era idealism mahasiswa. Sehingga kelompok Cipayung memandang organisasi seperti Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, Ahmadiyah, Gerakan Pemuda Ka'bah, hampir tidak memiliki basis pengorganisaan yang kuat di mahasiswa, kecuali Hizbut Tahrir yang memiliki kekhasan mendiskusikan radikalasasi dalam pemikiran melalui diskusi terbatas, dan public yang terorganisir.¹⁶

Kedua, hadirnya kelompok radikal keagamaan di sejumlah kampus di Yogyakarta, difahami belum menjadi ancaman serius bagi eksistensi kelompok Cipayung. Meskipun secara factual, diakui bahwa proses mencari kader bagi organisasi Cipayung semakin sulit, terkait dengan semakin dominannya pragmatisme ekonomi, budaya rekreatif di kalangan mahasiswa. Dan bukan karena semakin tertariknya

dalam Lihat dalam Alexander E. Wendt, *"The Agent-Structure Problem in International Relations Theory"*, *International Organization*, Vol. 41, No. 3. (Summer, 1987), pp. 335-370

¹⁵ Wawancara dengan aktivis PMII di Cabang Yogyakarta, dan aktivis HMI Dipo di Cabang Yogyakarta, dan Komosariat di UGM, UII, dan UMY.

¹⁶ Hizbut Tahrir membuat sebuah front khusus dengan nama Gema Pembebasan, yang membuat diskusi dan memasang stiker, pamlet terhadap issue aktual

mahasiswa dengan organisasi radikal, yang difahami menawarkan pemikiran utopis, militansi yang tinggi, dan janji keagamaan.

Bahkan yang justru dianggap competitor sejati adalah KAMMI, yang disejumlah aktivis PMII dan HMI Dipo justru sebagai organisasi radikal yang masuk dalam dunia kemahasiswaan. Aktivis PMII di UIN Suka, justru melihat KAMMI sebagai organisasi radikal yang kompetitif di politik Kampus, dan mengancam mimbar akademik kampus. Secara factual, KAMMI menjadi organisasi kemahasiswaan yang memiliki jaringan keluar dan ke dalam secara baik, mampu berdiskusi, mampu membangun aksi, dan membuat forum alternatif. Yang memungkinkan aktivis KAMMI dapat masuk ke dalam struktur politik mahasiswa maupun struktur pembelajaran keagamaan di Kampus melalui program formal dari kampus, seperti mentoring keagamaan.¹⁷

Bagaimana halnya dengan kelompok radikal politik? Dalam pandangan aktivis Cipayung, radikal politik dalam dunia kemahasiswaan banyak diperankan oleh kelompok kiri, seperti Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), ataupun kelompok Sekolah Bersama (SEKBER), serta Sopink (Solidaritas Orang Pinggiran). Bagi kelompok Cipayung, diskursus radikalisasi politik yang dijalankan oleh kelompok kiri sangat menarik perhatian, di samping karena pemikiran politik yang sering kali sangat mengandalkan nalar filsafat yang permissive, dalam pemikiran dan mobilisasi aksi. Namun dalam perjalanan politik di Kampus, kelompok kiri tidak banyak mendapatkan posisi politik dalam lembaga mahasiswa, dan banyak mendapatkan panggung dalam politik di luar kampus, terutama dalam mendiskusikan issue penentangan pada liberalisasi ekonomi, dan pendidikan yang dianggap semakin kapitalistik.

Terkait dengan maraknya aksi radikal keagamaan yang dilekatkan pada aktivitas terorisme yang terjadi di masyarakat, para aktivis organisasi Cipayung memandang bahwa proliferasi (penyebaran) radikalisme-terorisme tidak banyak menggunakan saluran organisasi kemahasiswaan, baik dalam organisasi formal seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Senat Mahasiswa (SM), Korp Mahasiswa Jurusan (KMJ), dan organisasi peminatan khusus yang bergerak di bidang penelitian, seni, pecinta alam, kepramukaan dan lain-lain. Sehingga eksistensi kelompok radikalist-terorist, cenderung melakukan perekrutan secara privat dan sembunyi-sembunyi, terhadap kalangan mahasiswa.

Sejumlah temuan mahasiswa yang tergabung dalam jaringan NII, yang marak terjadi di tahun 2010, menunjukkan bahwa rekrutmen mahasiswa dipergunakan untuk mensuplai kebutuhan ekonomi dari organisasi radikal melalui pembayaran iuran rutin dan infaq pada organisasi. Mahasiswa diasumsikan

¹⁷ Sejumlah pengalaman di UGM, UMY, UAD menunjukkan gejala tersebut. Lihat dalam Surwandono, *Fiqh Perbedaan Dalam Dunia Kemahasiswaan*, Yogyakarta, NF Publishing, 2013.

sebagai keluarga dari kelompok menengah ke atas yang memiliki capital ekonomi yang memadai. Sebagaimana halnya dengan kelompok radikal politik-keagamaan, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang marak tahun 2015-2016, yang juga menjadikan kalangan kampus sebagai target mobilisasi ekonomi organisasi.¹⁸

Kelompok Cipayung memiliki tanggung jawab moral sebagai agen deradikalisasi keagamaan dan politik, yang melakukan strategi penghalalan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan politik dan keagamaan. Melalui aktivitas akademik kritis, seperti training, diskusi perdebatan pemikiran, outbound, yang pada prinsip tidak melawan hadirnya kelompok radikalisme-kekerasan-terorisme dengan tindakan kekerasan serupa. Bagi sejumlah aktivis PMII di Jogjakarta, sudah saat aktivis ekstra kampus untuk melakukan diskursus secara serius dalam menghadapi hadirnya kelompok radikal politik dan keagamaan.¹⁹

Sedangkan bagi aktivis KAMMI, yang juga terstigma sebagai kelompok radikal di Kampus, memandang bahwa hadirnya gerakan radikal politik dan keagamaan harus disyukuri karena menurut mereka hadirnya kelompok tersebut merupakan keniscayaan dalam kehidupan social yang memiliki pluralitas, diciptakan berbeda-beda, asalkan mereka tidak sampai mengganggu gerakan yang lain.²⁰

Namun yang harus difahami bersama, sebagaimana teori strukturasi dari Giddens, kompetitifnya organisasi ekstra kampus dalam kompetisi dengan gerakan radikal politik dan keagamaan yang relative masih bergerak secara sporadic, dan terbatas. Andaikan saja organisasi radikal keagamaan tersebut, bergerak dengan supra-struktur yang memadai, sebagaimana yang terjadi di Afghanistan maupun Negara Timur Tengah lainnya, akan sangat mungkin justru organisasi ekstra kampuslah yang akan jadi sub-ordinat.

Sebagian besar organisasi ekstra kampus juga menyadari mengalami persoalan yang serius dengan supra-struktur berupa ide, tata nilai, pemikiran alternative yang mampu menarik banyak kalangan baik mahasiswa, maupun stakeholders untuk tumbuh dan berkembang bersama sebagaimana era kejayaan kelompok Cipayung di periode 1980 sebelum NKK-BKK, maupun menjelang era reformasi. Mahasiswa tidak bergairah untuk terlibat dalam aktivitas organisasi ekstra kampus, demikian pula masyarakat di luar kampus juga tidak antusias dalam memberikan dukungan moral, dan material untuk eksistensi social dan politik organisasi ekstra kampus. Kurangnya supra-struktur yang kuat, juga diperlemah dengan kekuatan infra-struktur dan jaringan yang tidak kohesif membuat kapasitas organisasi ekstra kampus untuk menetralsir

¹⁸ Lihat dalam "Membaca Aliran Salah Kaprah," dalam Surwandono, *Separatisme dan Politik Kekerasan*, Yogyakarta, Jurusan HI UMY dan CV Komojoyo, 2015.

¹⁹ Wawancara dengan aktivis PMII Cabang Yogyakarta.

²⁰ Wawancara dengan aktivis KAMMI di Cabang Yogyakarta

dalam mendiskusikan pemikiran kelompok radikal menjadi sangat terbatas dan diragukan.

Dalam konteks ini, sesungguhnya menjadi tanggung jawab dari perguruan tinggi bersama pemerintah untuk memberikan ruang yang luas kepada organisasi ekstra kampus untuk tumbuh menjadi organisasi yang otonom, matang, mandiri. Sejumlah regulasi kependidikan, selayaknya memberikan affirmative action kepada tumbuhnya pemikiran kritis, dan alternative, yang mampu menjadi penyangga peradaban bangsa.

IV. KESIMPULAN

Organisasi ekstra kampus, dalam konteks dimensi kesejarahan Indonesia, memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun diskursus deradikalisasi politik keagamaan dan politik, secara intelektual dan humanis. Posisi ini akan memungkinkan diskursus deradikalisasi pemikiran politik dan keagamaan akan mengarusutamakan pada issue keamanan manusia (*human security*) daripada keamanan Negara (*state security*).

Dalam konteks situasi non krisis, posisi organisasi ekstra kampus relatif masih *leading* dibandingkan dengan organisasi radikal politik dan keagamaan yang mulai masuk ke kampus. Namun, organisasi ekstra kampus juga mengalami kapasitas supra-struktur dan infra-struktur, sehingga berpengaruh kepada kinerja organisasi ekstra kampus sebagai penyangga peradaban bangsa. Diperlukan sinergi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas organisasi ekstra kampus menjadi organisasi kemahasiswaan yang mandiri, otonom, dan kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alexander E. Wendt, 1987, "The Agent-Structure Problem in International Relations Theory", *International Organization*, Vol. 41, No. 3.
- [2] Asfar, Muhammad (ed). 2007, *Islam lunak, Islam radikal: Pesantren, terorisme, dan bom Bali*, Surabaya: JP Press.
- [3] Azra, Azyumardi, 2003, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Paramadina
- [4] Duverger, Maurice, 2003, *Sosiologi Politik*, Jakarta, Penerbit Radjawali
- [5] Giddens, Antony, 1979, *Central Problems in Social Theory*, Berkeley: University of California Press,
- [6] Giddens, Antony, 1984, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, Cambridge, U.K.: Polity Press

[7] Golose, Petrus, 2010, *Deradikalisasi terorisme : humanis, soul approach, dan menyentuh akar rumput*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian

[8] Hunter, T Shireen, 2003, *Islamic Revivalism: Unity and Diversity*, Bloomington,

[9] Republika, Rabu , 6 Oktober 2010

[11] Surwandono, 2013, *Fiqh Perbedaan Dalam Dunia Kemahasiswaan*, Yogyakarta, NF Publishing, 2013.

[12] Surwandono, 2015, *Separatisme dan Politik Kekerasan*, Yogyakarta, Jurusan HI UMY dan CV Komojoyo, 2015.

[13] Surwandono, Sidiq Ahmadi, *Pelebagaan Fiqh Perbedaan Dalam Mendiskusikan Pemikiran Islam Berbasis Liberal dan Fundamental Pada Organisasi Ekstra Kampus Berbasis Islam di Yogyakarta*, Laporan Penelitian Hibah Bersaing (tidak diterbitkan), Yogyakarta, Fisipol UMY, 2010

[14] Turmudi, Endang dan Sihbudi, R. (2005). *Islam dan radikalisme di Indonesia*. Jakarta, LIPI Press).

[15] Yunanto, Sri, *Gerakan militan Islam: Di Indonesia dan di Asia Tenggara*, [*Islamic militant movement: in Indonesia and Southeast Asia*]. Jakarta: Ridep Institute, 2003

[16] Zada, K. (2003). *Islam radikal: Pergulatan ormas-ormas Islam garis keras di Indonesia* Jakarta: Teraju.